

# Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia Tasmilah



**Tasmilah**<sup>1</sup>; <sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kota Malang, Jl. Janti Bar. No.47, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 2021-05-20

Received in revised form 2021-05-21

Accepted 2021-06-24

### Kata kunci:

Belanja Pemerintah,  
Pertumbuhan Ekonomi,  
Tenaga Kerja Formal, 2SLS

### Keywords:

Government Spending,  
Economic Growth, Formal  
Labor, 2SLS

### How to cite item:

Tasmilah. (2021). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2).

## Abstrak

Tenaga Kerja di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja informal, padahal untuk meningkatkan kesejahteraan diperlukan mobilitas dari tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia. Data 33 provinsi tahun 2016-2020 diolah dengan menggunakan analisis persamaan simultan 2SLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah (menurut fungsi ekonomi, infrastruktur/perumahan dan fasilitas umum, dan perlindungan sosial), PMA, dan jumlah tenaga kerja formal. Variabel yang berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah fungsi pariwisata dan PMDN. Sedangkan belanja pemerintah fungsi ekonomi, fungsi infrastruktur, PMA, dan IPM berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia..

Labor in Indonesia is dominated by informal labor, whereas to improve welfare requires mobility from informal labor to formal labor. This study aims to estimate the effect of government spending and economic growth on the absorption of formal labor in Indonesia. Data from 33 provinces for 2016-2020 were processed using the 2SLS simultaneous equation analysis. The results of the analysis show that the variables that have a positive effect on economic growth are government spending (according to economic, infrastructure / housing and public facilities, and social protection), foreign investment, and the number of formal labor. The variables that have a positive effect on the absorption of formal labor in Indonesia are economic growth, government spending on the tourism and domestic investment. Meanwhile, government spending on economic, infrastructure functions, foreign investment, and HDI negatively affects the absorption of formal labor in Indonesia.

\* Tasmilah.

© 2021 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Tenaga kerja formal di Indonesia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja informal. Hasil survei angkatan kerja nasional (BPS, 2020) menyebutkan bahwa tenaga kerja formal di Indonesia sebesar 39,53 persen dan tenaga kerja informal masih mendominasi dengan persentase mencapai 60,47 persen. Menurut ILO (2010) pekerjaan di sektor informal identik dengan pekerjaan yang tidak layak, tingkat pendapatan rendah, memiliki resiko tinggi, serta tidak terdapat jaminan/perlindungan sosial. Informalitas juga mempunyai dampak yang berbahaya terhadap hak-hak pekerja dan mempunyai dampak negatif terhadap *sustainable enterprises* karena faktor rendahnya produktifitas dan terbatasnya akses modal (ILO, 2018). Bahkan menurut penelitian dari Dartanto *et al.* (2020), untuk meningkatkan kesejahteraan diperlukan peralihan pekerjaan kepada sektor formal.

Hasil penelitian Moeis *et al.* (2020) juga menyebutkan faktor-faktor yang mendorong mobilitas ekonomi adalah capaian pendidikan, pekerjaan formal, pasokan listrik dan air, kepemilikan tanah, dan investasi kesehatan. Sarte (2000) menyebutkan bahwa besarnya proporsi sektor informal berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam dua cara. Pertama, regulasi yang terlalu berlebihan/ketat dapat melemahkan sektor informal yang pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kedua, sektor informal yang besar dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak sehingga membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang berujung kepada rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 01 menjelaskan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir, setiap pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh penambahan jumlah penduduk bekerja, kecuali pada tahun 2011 pada saat ekonomi tumbuh sebesar 6,17 persen terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja sebanyak 791.458 orang. Pada tahun yang lain, meski terjadi penyerapan tenaga kerja, namun yang terjadi adalah peningkatan jumlah tenaga kerja informal yang lebih besar dibandingkan peningkatan tenaga kerja formal. Selain itu, dalam beberapa kasus pertumbuhan ekonomi rendah yang terjadi akibat penurunan tenaga kerja formal dan peningkatan tenaga kerja informal. Pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 6,38 persen pada tahun 2010, penyerapan tenaga kerja formal sangat tinggi mencapai

3,64 juta orang dan jumlah tenaga kerja informal mengalami penurunan 299,02 ribu orang, oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja formal agar kesejahteraan penduduk meningkat. Intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengalokasikan belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan belanja pemerintah diyakini oleh Keynes akan menstimulus output dalam suatu sistem ekonomi. Belanja pemerintah menjadi salah satu variabel eksogen yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang bertambah lebih dari dua juta orang setiap tahun. Disamping itu, jumlah penduduk yang menganggur di Indonesia mencapai 9,67 juta orang (BPS, 2020b) maka diperlukan lapangan pekerjaan baru melalui pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 01. Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2000-2020**

Tahun	LPE	Jumlah TK Formal	Jumlah TK informal	Perubahan TK Formal	Perubahan TK Informal
2000	4,92	31.530.566	58.307.164		
2001	3,64	29.367.878	61.439.539	(2.162.688)	3.132.375
2002	4,50	27.836.019	63.811.147	(1.531.859)	2.371.608
2003	4,78	26.822.530	65.988.261	(1.013.489)	2.177.114
2004	5,03	28.425.447	65.296.589	1.602.917	(691.672)
2005	5,69	28.877.029	65.081.358	451.582	(215.231)
2006	5,50	29.672.337	65.784.598	795.308	703.240
2007	6,35	30.926.222	69.003.995	1.253.885	3.219.397
2008	6,01	31.199.099	71.353.651	272.877	2.349.656
2009	4,63	32.147.261	72.723.402	948.162	1.369.751
2010	6,38	35.783.381	72.424.386	3.636.120	(299.016)
2011	6,17	40.563.180	66.853.129	4.779.799	(5.571.257)
2012	6,03	44.824.702	67.680.166	4.261.522	827.037
2013	5,56	44.986.416	67.774.656	161.714	94.490
2014	5,01	46.558.877	68.069.149	1.572.461	294.493
2015	4,88	48.506.730	66.312.469	1.947.853	(1.756.680)
2016	5,03	50.207.787	68.204.186	1.701.057	1.891.717
2017	5,07	52.001.697	69.020.726	1.793.910	816.540
2018	5,17	54.328.061	71.954.125	2.326.364	2.933.399

Tahun	LPE	Jumlah TK Formal	Jumlah TK informal	Perubahan TK Formal	Perubahan TK Informal
2019	5,02	56.804.307	71.950.964	2.476.246	(3.161)
2020	-2,07	50.771.849	77.682.335	(6.032.458)	5.731.371

Sumber: BPS, 2020

Penelitian terkait pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pernah dilakukan oleh Terminanto (2017) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Barro (1991) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa belanja pemerintah memberikan pengaruh yang negatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Agell et al. (1999) mengungkapkan belanja pemerintah tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dilakukan Yuen (2003) dan Hohberg & Lay (2015) mengungkapkan bahwa PDRB berdampak positif terhadap peluang untuk tetap bekerja. Peningkatan pada PDRB mengakibatkan peluang untuk bekerja pada sektor formal semakin besar. Hal sebaliknya terjadi ketika PDRB mengalami penurunan terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal (Hohberg & Lay, 2015). Barro (1991) berpendapat bahwa pengeluaran publik yang produktif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran yang tidak produktif memberikan hasil yang sebaliknya. Belanja publik untuk pendidikan merupakan indikator pembentukan modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja sehingga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga sudah banyak dilakukan, namun jarang sekali yang merinci menjadi tenaga kerja formal dan informal. Padahal peningkatan status menjadi tenaga kerja formal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh belanja pemerintah menurut fungsi kegiatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia.

---

## **2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Keynes disebutkan bahwa perekonomian dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C), pengeluaran investasi oleh perusahaan (I) dan pengeluaran pemerintah (G). Keynes meyakini bahwa pemerintah memiliki peranan yang besar dalam mendorong peningkatan produksi barang dan jasa melalui peningkatan belanja pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi (Case & Fair, 2000). Studi empiris terkait dampak belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menemukan tiga jenis hubungan yaitu hubungan positif, negatif, dan hubungan yang tidak signifikan. Pada hubungan yang positif berarti bahwa belanja pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fan *et al.* 2004). Pada hubungan yang negatif, belanja pemerintah berdampak negatif dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Barro, 1990, 1991). Pada hubungan yang tidak signifikan, hal ini berarti bahwa belanja pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Barro, 1991).

Belanja pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan dianggap berdampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan memberikan dampak positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran untuk kesehatan tidak berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Mukui *et al.* (2019). Investasi yang lebih banyak pada modal manusia melalui pendidikan khususnya pada jenjang yang lebih tinggi, akan memungkinkan modal manusia berkembang secara dinamsi untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang secara positif (Adejumo *et al.* 2021).

Investasi memiliki peran dalam mendorong produksi barang dan jasa, Asiyani (2013) meneliti pengaruh investasi asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi, hasilnya PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan Momongan

(2013) yang menyebutkan bahwa PMDN memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang sangat ditentukan oleh faktor modal fisik (K), faktor tenaga kerja (L) dan faktor modal manusia (Hc). Model persamaan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk yang sederhana dapat dirumuskan dalam fungsi persamaan sebagai berikut:

$$Y = F (K, L, Hc, Z),$$

Dalam hal ini, K (Kapital) mencerminkan modal fisik; L (Labor) merupakan tenaga kerja, Hc (Human Capital) menunjukkan modal manusia; sedangkan Z adalah variabel lainnya yang memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi. Z bisa merupakan belanja pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas modal manusia yang berupa pengeluaran kesehatan dan pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teori akan berpengaruh pada penciptaan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan jumlah pengangguran. Apabila jumlah keseluruhan output mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan pada penurunan pada tingkat pengangguran (unemployment) (Case & Fair, 2000). Penelitian Hohberg & Lay (2015) dengan data IFLS mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi berpengaruh positif dan signifikan dalam penambahan penduduk bekerja di Indonesia.

Hasil penelitian Taufik (2011) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi berdampak positif terhadap peningkatan jumlah penduduk bekerja. Demikian juga hasil penelitian dari Nurhardiansyah et al., (2017). Untuk sektor industri, hasil penelitian (Sayfullah & Supriatna, 2017) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor industri dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil berbeda terjadi pada negara dengan andil sektor pertanian yang besar sebagaimana penelitian Olamide (2020) di Nigeria yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat kecil pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja. Hantiar (2021) yang memilah investasi berdasarkan asalnya menyebutkan bahwa investasi asing (PMA) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dampak pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga

kerja dilakukan oleh (Eneji *et al.* 2020), pengeluaran untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, demikian juga pengeluaran untuk kesehatan dan pertanian. Penelitian ini menyarankan agar prioritas harus diberikan untuk Pendidikan, perawatan kesehatan, pariwisata, pertanian dan industri. Hal tersebut akan menyediakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

IPM (Indek Pembangunan Manusia) sebagai salah satu indikator modal manusia terdiri atas komponen pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan yang baik akan berpotensi memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi sehingga berpeluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan. Penelitian terkait pengaruh IPM terhadap penyerapan tenaga kerja dilakukan oleh Nurhardiansyah *et al.*, (2017), hasilnya bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di Jawa Timur. Nurkhasanah (2018) menyebutkan bahwa IPM dan investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran, artinya bahwa setiap peningkatan IPM dan investasi akan menurunkan jumlah pengangguran (meningkatkan jumlah penduduk bekerja). Khusus untuk sektor perdagangan, IPM memberikan pengaruh yang negatif terhadap peningkatan jumlah penduduk bekerja (Destiana & Prawoto, 2018).

Pembahasan terkait tenaga kerja formal dan informal tidak terlepas dari konsep dualisme pembangunan ekonomi yang diperkenalkan oleh Lewis. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang berorientasi padat modal dan produksi skala besar sedangkan di sisi lain subsisten pedesaan berorientasi padat karya dan produksi skala kecil. Analisis dualisme ini juga diterapkan pada perekonomian perkotaan yang dibagi menjadi sektor formal dan sektor informal (Todaro & Smith, 2012). Pada tahun 1973, Keith Hart memperkenalkan konsep sektor informal melalui penelitiannya pada migran perkotaan di Ghana. Hart (1973) mengidentikkan sektor formal dengan pekerjaan yang mempunyai gaji tetap, sedangkan sektor informal identik dengan status wirausaha. Di Indonesia mulai Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Februari tahun 2016, penetapan usaha dan tenaga kerja informal dan formal sudah merujuk pada konsep pekerjaan informal dan formal yang ditentukan melalui ICLS (*International Conference on Labor Statisticians*) ke-17 tahun 2013 yang juga merupakan rekomendasi dari ILO.

Comola & De Mello (2011) menggunakan data Sakernas dan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di tingkat kabupaten menemukan bahwa peningkatan lapangan kerja informal lebih dari sekadar kompensasi hilangnya pekerjaan di sektor formal. Sumber daya manusia, diproksikan dengan intensitas sekolah untuk menghindari kemungkinan endogenitas bias yang timbul akibat dimasukkannya pencapaian pendidikan dalam regresi, berkorelasi negatif dengan pekerjaan sektor formal dan berpengaruh positif terhadap pekerjaan sektor informal. Dipekerjakan di sektor formal atau sektor informal terkait secara signifikan dengan pertumbuhan PDB provinsi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong secara keseluruhan dalam penciptaan lapangan kerja sektor formal dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja informal (Hohberg & Lay, 2015).

Tenaga kerja tidak terampil memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk keluar dari sektor formal dibandingkan dengan tenaga kerja terampil. Demikian juga tenaga kerja dengan pendidikan rendah memiliki probabilitas yang lebih besar untuk keluar dari sektor formal (Tridiana & Widyawati, 2019). Artinya selain diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi juga diperlukan keterampilan agar angkatan kerja memiliki peluang yang lebih besar untuk masuk pada sektor formal dan meningkatkan kesejahteraannya.

---

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan analisis pada data-data numerik menggunakan metode statistik. Data yang digunakan adalah data panel yang meliputi 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Dalam penelitian ini variabel endogen yang digunakan adalah jumlah tenaga kerja formal dan PDRB atas harga konstan. Variabel modal manusia dalam penelitian ini diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah definisi variabel yang digunakan pada penelitian ini:

**Tabel 02. Deskripsi Variabel dan Sumber Data**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 (miliar rupiah)	BPS
Didik	Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi pendidikan (ribu rupiah)	DJPK
Sehat	Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi kesehatan (ribu rupiah)	DJPK
Ekonomi	Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi ekonomi (ribu rupiah)	DJPK
Perumfasum	Belanja pemerintah di provinsi untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum.(ribu rupiah)	DJPK
Wisata	Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi pariwisata (ribu rupiah)	DJPK
Perlinsos	Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi perlindungan sosial (ribu rupiah)	DJPK
PMDN	Realisasi penanaman modal yang berasal dari dalam negeri di suatu provinsi (juta rupiah)	BKPM
PMA	Realisasi penanaman modal yang berasal dari luar negeri/asing di suatu provinsi (juta dollar)	BKPM
Formal	Jumlah tenaga kerja formal (orang)	BPS
Informal	Jumlah tenaga kerja informal (orang)	BPS
IPM	Indeks pembangunan manusia	BPS

Sumber: Data Sekunder (2021)

Data belanja pemerintah di daerah yang digunakan pada penelitian ini adalah penjumlahan antara realisasi APBD di setiap provinsi dan realisasi belanja APBD di setiap kabupaten/kota. Realisasi belanja daerah dirinci menurut fungsi kegiatan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, perumahan dan fasilitas umum, dan perlindungan sosial. Pada penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan atas harga konstan tahun 2010.

Penentuan tenaga kerja formal dan informal yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh BPS, yaitu berdasarkan status pekerjaan utama. Status pekerjaan utama mengikuti konsep BPS terdiri dari 7 kategori yaitu: (i) berusaha/berwirausaha sendiri; (ii) berusaha/berwirausaha dibantu oleh buruh tidak dibayar/tidak tetap; (iii) berusaha/berwirausaha yang dibantu buruh dibayar/buruh tetap; (iv) karyawan/buruh/pegawai; (v) pekerja bebas pada sektor pertanian; (vi) pekerja bebas pada sektor non pertanian; dan (vii) pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Tenaga kerja di sektor formal

adalah tenaga kerja dengan status 3 dan 4 (berusaha/beriwirausaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai), sedangkan selebihnya masuk ke dalam kategori tenaga kerja informal.

Untuk memperoleh hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja formal digunakan model persamaan simultan yang terdiri atas dua persamaan struktural. Kedua persamaan tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi karena ada satu variabel bebas dalam satu persamaan yang menjadi variabel terikat pada persamaan yang lainnya. Masalah simultanitas timbul karena adanya korelasi antara variabel endogen dengan error atau *disturbance*. Apabila terdapat hubungan yang simultan antar persamaan maka metode *Ordinary Least Square* bukanlah estimator yang efisien dan konsisten. Metode *Two Stage Least Square* (2SLS) dan variabel instrumental akan memberikan hasil estimasi yang konsisten dan efisien. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja.

Model dibangun berdasarkan teori ekonomi dan kajian studi sebelumnya. Model persamaan simultan untuk penyerapan tenaga kerja formal dijelaskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{LnPDRB}_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \text{LnDidik}_{it} + \beta_2 \text{LnSehat}_{it} + \beta_3 \text{LnEkonomi}_{it} + \\
 &\quad \beta_4 \text{LnPerumfasum}_{it} + \beta_5 \text{LnWisata}_{it} + \beta_6 \text{LnPerlinsos}_{it} + \\
 &\quad \beta_7 \text{LnPMDN}_{it} + \beta_8 \text{LnPMA}_{it} \varepsilon + \beta_9 \text{LnFormal}_{it} + \\
 &\quad \beta_{10} \text{LnInformal}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{LnFormal}_{it} &= \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{it} + \beta_1 \text{LnEkonomi}_{it} + \beta_4 \text{LnPerumfasum}_{it} + \\
 &\quad \beta_5 \text{LnWisata}_{it} + \beta_7 \text{LnPMDN}_{it} + \beta_8 \text{LnPMA}_{it} \varepsilon + \\
 &\quad \beta_9 \text{LnIPM}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(2)
 \end{aligned}$$

Dalam melakukan estimasi parameter pada model sistem persamaan simultan didahului dengan uji simultan. Uji simultan bisa dilakukan melalui identifikasi order dan rank condition serta uji empiris dengan uji Hausman. Berdasarkan identifikasi model, kedua persamaan struktural dalam model persamaan simultan dapat diputuskan bahwa kedua persamaan tersebut dikategorikan sebagai persamaan yang *over identified*, sehingga diestimasi dengan menggunakan metode two-stage Least Square (2SLS). Metode 2SLS dipilih karena dapat menghasilkan estimasi yang konsisten, sederhana, dan mudah dibandingkan (Gujarati & Porter, 2013).

Berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 03. Hasil Uji Simultanitas Model Sistem Persamaan Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Tenaga Kerja Formal**

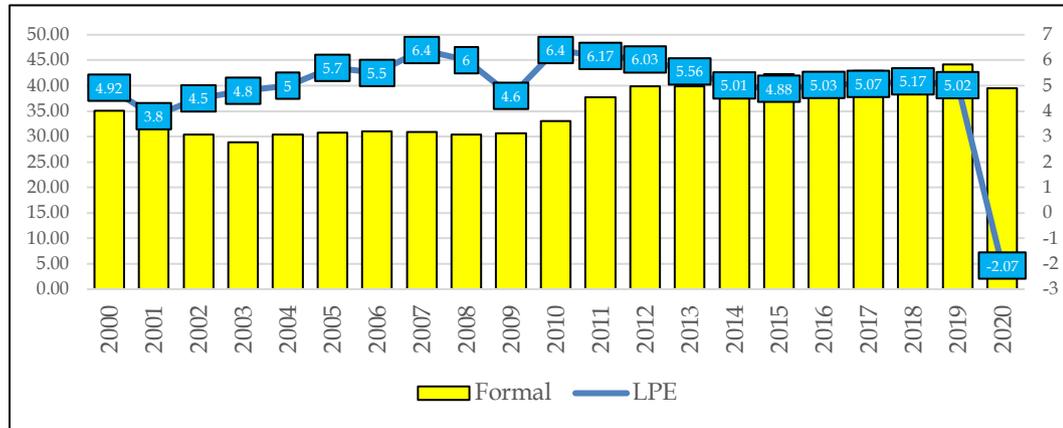
Persamaan	Variabel	Chi <sup>2</sup>	Prob	Keterangan
1	LnPDRB	0,01	1,0000	Tidak Ada Efek Simultan
2	LnFormal	48,26	0,0000	Ada Efek Simultan

Untuk persamaan 1 dilakukan analisis dengan OLS sedangkan persamaan 2 dilakukan analisis dengan model persamaan simultan 2SLS. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal.

#### 4. Hasil Pembahasan

Persentase tenaga kerja formal di Indonesia dalam 20 tahun terakhir mengalami trend peningkatan, dengan persentase terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar 28.90 persen dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 44, 12 persen. Pada tahun 2020 persentase tenaga kerja formal mengalami penurunan menjadi 39,53 persen dan tenaga kerja informal melonjak menjadi 60,47 persen. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan resesi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen. Penurunan persentase tenaga kerja formal pada periode sebelumnya yaitu tahun 2001 dan 2008 juga bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2001 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 4,92 persen menjadi 3,8 persen. Demikian juga pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 6,4 persen pada tahun 2007 menjadi 6 persen pada tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2000 hingga 2019 mengalami fluktuasi dalam kisaran 3,8 persen hingga 6,4 persen. Dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu bernilai positif kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,07 persen.

**Gambar 01. Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2020**



Sumber: Data Sekunder BPS, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tenaga kerja formal terdiri atas karyawan/buruh/pegawai dan berusaha/berwirausaha dibantu oleh buruh tetap/dibayar. Jumlah buruh /karyawan/pegawai pada tahun 2020 berjumlah 46,72 Juta orang atau setara dengan 36,37 persen dari seluruh penduduk bekerja di Indonesia. Jumlah wirausaha/berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 4,05 Juta orang atau setara dengan 3,15 persen. Tenaga kerja informal paling banyak berstatus sebagai wirausaha/berusaha sendiri dengan jumlah mencapai 26,17 Juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap berjumlah 20,07 juta orang, pekerja keluarga/tidak dibayar 18,32 Juta orang, pekerja bebas pertanian 5,92 Juta orang, dan pekerja bebas nonpertanian 7,20 Juta orang.

**Tabel 04. Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2018-2020**

Status pekerjaan utama	2018		2019		2020	
	Juta orang	Persen	Juta orang	Persen	Juta orang	Persen
<b>Formal</b>	<b>54,33</b>	<b>43,02</b>	<b>56,80</b>	<b>44,12</b>	<b>50,77</b>	<b>39,53</b>
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4,38	3,47	4,46	3,47	4,05	3,15
Buruh/karyawan/pegawai	49,95	39,55	52,34	40,65	46,72	36,37
<b>Informal</b>	<b>71,96</b>	<b>56,98</b>	<b>71,96</b>	<b>55,88</b>	<b>77,68</b>	<b>60,47</b>
Berusaha sendiri	24,13	19,10	26,13	20,29	26,17	20,38
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	20,10	15,92	18,94	14,71	20,07	15,63
Pekerja bebas pertanian	5,29	4,19	5,28	4,10	5,92	4,61
Pekerja bebas nonpertanian	7,10	5,62	6,85	5,32	7,20	5,60
Pekerja keluarga/tidak dibayar	15,34	12,15	14,76	11,46	18,32	14,26
<b>Jumlah</b>	<b>126,29</b>	<b>100</b>	<b>128,76</b>	<b>100</b>	<b>128,45</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Sekunder BPS, 2020

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 5, rata-rata PDRB atas harga konstan dari tahun 2015-2020 sebesar Rp334.202 Miliar dengan nilai minimum sebesar Rp26.638 miliar dan nilai maksimal sebesar Rp2.352.425 Miliar. PDRB tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dan terendah di Provinsi Maluku Utara. Realisasi belanja untuk pendidikan rata-rata setiap provinsi sebesar Rp7,49 Miliar rupiah dengan nilai terendah sebesar Rp220,06 Juta di Provinsi Sulawesi Barat dan tertinggi Rp46,30 Miliar di Provinsi Jawa Barat. Untuk belanja sektor kesehatan rata-rata sebesar Rp4,11 Miliar dengan nilai terendah sebesar RpRp203,44 Juta di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 dan tertinggi sebesar Rp23,28 Miliar di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Pada tahun 2020 belanja untuk sektor kesehatan mengalami kenaikan di semua provinsi, hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19. Kualitas sumberdaya manusia dalam penelitian ini menggunakan IPM, nilai tertinggi Provinsi DIY yaitu sebesar 79,99 pada tahun 2019 dan IPM paling rendah Provinsi Papua yakni 57,25 pada tahun 2015.

**Tabel 05. Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	Jumlah Observasi	Rata-Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
PDRB	198	334.202	460.866	26.638	2.352.425
Didik	198	7.492.141	9.497.548	220.062	46.304.075
Sehat	198	3.667.303	4.113.118	203.443	23.281.128
Ekonomi	198	1.963.249	1.684.015	419.548	11.235.881
Perumfasum	198	3.758.384	3.407.369	86.299	22.055.063
Wisata	198	192.698	166.151	32.525	1.002.838
Perlinsos	198	383.903	311.987	65.391	1.662.934
PMDN	198	5.474.879	9.163.562	48.23	56.340.000
PMA	198	614,06	914,84	2,03	5.738
Formal	198	147.589	226.098	14.991	1.098.588
Informal	198	2.095.391	2.992.625	115.291	13.345.308
IPM	198	69,69	3,75	57,25	79,99

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Jumlah tenaga kerja formal paling banyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 1,09 juta orang pada tahun 2019. Sedangkan paling sedikit di Provinsi Papua Barat yakni sebanyak 14,99 ribu orang pada tahun 2015. Pada tahun 2020, semua provinsi di Indonesia mengalami penurunan jumlah tenaga kerja formal akibat pandemi Covid-19 dan penurunan aktivitas perekonomian. Sedangkan untuk tenaga kerja informal paling banyak di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 13,34 juta orang dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 115,29 ribu orang.

Secara persentase, tenaga kerja informal paling tinggi di Provinsi Papua yang mencapai 81,49 persen pada tahun 2015 dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 yang mencapai 28,10 persen.

Dari hasil estimasi di atas, koefisien determinasi untuk struktur persamaan PDRB sebesar 91.84%, artinya bahwa variabel yang ditentukan (*predetermined*) dan variabel endogen (tenaga kerja formal) dapat menjelaskan variasi PDRB sebesar 91,84 persen. Sisanya sebesar 8,16% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. Nilai Prob- $\chi^2$  sebesar 0,0000 artinya model memenuhi *goodness of fit* pada tingkat kesalahan alpha 1 persen. Variabel belanja pemerintah yang berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah menurut fungsi ekonomi, fungsi perumahan dan fasilitas umum, dan fungsi perlindungan sosial. Sedangkan belanja pemerintah menurut fungsi kesehatan dan pariwisata memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 06. Hasil Estimasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia**

Variabel	Koefisien Parameter	
	LnPDRB	LnFormal
Intersep	-2,291528*	10,96685**
LnPDRB	-	1,221299*
LnDidik	-0,0595378	-
LnSehat	-0,49537*	-
LnEkonomi	0,2448945**	-0,2161612
LnPerumfasum	0,3171551*	-0,2312808**
LnWisata	-0,121113**	0,2736278*
LnPerlinsos	0,2974589**	-
LnPMDN	-0,0297821	0,0445642**
LnPMA	0,0399932**	-0,1019209*
LnIPM	-	-1,954579**
LnFormal	1,082835*	-
LnInformal	-0,2496888*	-
$R^2$	0,9184	0,8392
$\chi^2$	2086,84	1134,64
Prob – $\chi^2$	0,0000	0,0000

\*.\*\* signifikan pada 1%. 5%.

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan Mukui *et al.* (2019) di Kenya yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan infrastruktur

berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran kesehatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah yang memberikan pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi adalah belanja untuk perumahan dan fasilitas umum dengan koefisien senilai 0,32 persen. Belanja pemerintah untuk perumahan dan fasilitas umum termasuk di dalamnya untuk pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, setiap kenaikan belanja perlindungan sosial senilai 1 persen akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi senilai 0,3 persen. Hal tersebut disinyalir karena program perlindungan sosial akan meningkatkan daya beli bagi penduduk miskin sehingga akan mendorong permintaan barang dan jasa. Meskipun konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap PDB (57%), namun konsumsi penduduk 40 persen terbawah ini hanya berperan 17% dari seluruh konsumsi rumah tangga secara nasional. Kemudian untuk setiap peningkatan belanja fungsi ekonomi senilai 1 persen akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24 persen. Belanja fungsi ekonomi ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Belanja fungsi ekonomi dapat melalui pembangunan transportasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM dan koperasi, serta energi dan kedaulatan pangan

Investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) memberikan pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sebaliknya Penanaman Modal dari Dalam Negeri (PMDN) tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Asiyon (2013), namun berbeda dengan Momongan (2013).

Jumlah tenaga kerja formal memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 1,08. Artinya bahwa peningkatan 1 persen tenaga kerja formal akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar yaitu sebesar 1,08 persen. Berbeda dengan tenaga kerja informal yang memberikan pengaruh negatif dalam pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan jumlah tenaga kerja informal sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25 persen. Dampak negatif ini mendukung hasil penelitian Sarte (2000) dan

Elgin & Birinci (2016) bahwa informalitas yang tinggi pada negara berkembang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kenyataan ini menjadi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan mendorong tenaga kerja informal bertransisi menjadi tenaga kerja formal baik sebagai buruh/karyawan atau sebagai wirausaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Berdasarkan struktur persamaan tenaga kerja formal ( $\ln\text{Formal}$ ) didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,8392, yang artinya bahwa variabel yang ditentukan dan variabel endogen (PDRB) mampu menjelaskan variasi jumlah tenaga kerja formal sebesar 83,92 persen. Adapun sisanya senilai 16,08 persen dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. Nilai  $\text{Prob-}\chi^2=0,0000$  yang berarti bahwa model memenuhi *goodness of fit* pada tingkat kesalahan alpha 1%. Variabel yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal adalah pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah menurut fungsi pariwisata, dan penanaman modal dari dalam negeri. Sedangkan variabel yang memberikan pengaruh negatif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal di Indonesia adalah penanaman modal asing, belanja pemerintah menurut fungsi perumahan dan fasilitas umum, dan indeks pembangunan manusia.

Variabel belanja pemerintah menurut fungsi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja formal di Indonesia. Belanja fungsi ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan pengembangan UMKM dan Koperasi. Jumlah UMKM di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2020 mencapai 99,99 persen yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 98,70 persen, 1,2 persen usaha kecil, dan 0,09 persen usaha menengah. Pelaku usaha mikro yang tidak memiliki buruh tetap/dibayar masuk dalam kategori tenaga kerja informal. Sedangkan pelaku usaha yang termasuk kategori tenaga kerja formal adalah yang memiliki buruh tetap/dibayar. Agar belanja fungsi ekonomi berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja formal, maka perlu untuk memberikan alokasi yang besar untuk pelaku usaha mikro agar dapat naik kelas menjadi usaha kecil.

Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja formal sebesar 1,22 persen. Hal ini tidak

terlepas dari sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling besar ditopang oleh sektor industri dengan share 0,8 persen (sebelum pandemi). Hal ini mendukung penelitian Taufik (2011) dimana pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap peningkatan tenaga kerja. Untuk belanja pemerintah fungsi pariwisata setiap peningkatan sebesar 1 persen akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja formal sebesar 0,27 persen. Sedangkan peningkatan belanja pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum berdampak pada penurunan tenaga kerja formal sebesar 0,23 persen. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa PMDN memberikan dampak positif sedangkan PMA memberikan dampak negatif dalam penyerapan tenaga kerja formal. Investasi dalam negeri memberikan dampak yang sangat kecil dalam penyerapan tenaga kerja formal yaitu setiap penambahan investasi dalam negeri senilai 1 persen akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja formal hanya sebesar 0,04 persen. Adapun setiap peningkatan modal asing sebesar 1 persen akan berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja formal sebesar 0,10 persen. Hasil ini berbeda dengan Hantiar (2021) dimana PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM memberikan pengaruh negatif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal. Setiap peningkatan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah tenaga kerja formal sebesar 1,95 persen. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan Nurhardiansyah *et al.* (2017) yang menyebutkan bahwa IPM berdampak positif dan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja secara umum. Komponen IPM bidang pendidikan diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kedua indikator tersebut mencerminkan kuantitas (lama waktu) pendidikan belum mencerminkan kualitas pendidikan, padahal agar mampu masuk ke sektor formal diperlukan keterampilan sebagai hasil penelitian (Tridiana & Widyawati, 2019).

---

## 5. Penutup

Penelitian ini mengestimasi pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja formal di tingkat regional dengan menggunakan data panel dari 33 provinsi pada periode 2015-2020. Belanja pemerintah dirinci menurut fungsi kegiatan

dan merupakan penjumlahan realisasi APBD setiap provinsi dan realisasi APBD kabupaten/kota di setiap provinsi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja formal saling memengaruhi secara simultan. Pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal, demikian juga jumlah tenaga kerja formal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah untuk fungsi ekonomi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan dalam penyerapan tenaga kerja formal. Belanja perumahan dan fasilitas umum memberikan pengaruh yang positif dalam pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh negatif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal. Belanja fungsi pariwisata memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal. Belanja fungsi perlindungan sosial berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja fungsi kesehatan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Investasi luar negeri berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun memberikan pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja formal. Adapun investasi yang berasal dari dalam negeri meski tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, namun memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal. Kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM berpengaruh negatif dalam peningkatan jumlah tenaga formal.

Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, karena tingkat pendidikan tidak cukup untuk memasuki sektor formal. Dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, maka perlu meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia dengan meningkatkan investasi dalam negeri dan meningkatkan alokasi belanja fungsi pariwisata. Meningkatkan bantuan untuk UMKM terutama pada usaha mikro akan mendorong peningkatan skala usaha dan penggunaan buruh tetap/dibayar. Dalam proses ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi saja, namun juga mendorong transisi tenaga kerja

informal (pelaku usaha mikro tanpa buruh tetap/dibayar) menjadi tenaga kerja formal (wirausaha dengan buruh tetap/dibayar).

---

### Daftar Pustaka

- Adejumo, O. O., Asongu, S. A., & Adejumo, A. V. 2021. International Journal of Educational Development Education enrolment rate vs employment rate: Implications for sustainable human capital development in Nigeria. *International Journal of Educational Development*, 83(March 2020), 102385. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102385>
- Asiyan, S. 2013. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/*, 1 nomor 3, 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%25p>
- Badan Pusat Statistik. 2020a. Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020. In *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020b. Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2020. In *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2020*. BPS RI.
- Barro, R. J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S103-S125. <https://doi.org/10.1086/261726>
- Barro, R. J. 1991. Economic Growth In a Cross Section Of Countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407.
- Case, K. E., & Fair, R. C. 2000. *Principles of Macroeconomics*.
- Comola, M., & De Mello, L. 2011. How Does Decentralized Minimum Wage Setting Affect Employment And Informality? The Case Of Indonesia. *Review of Income and Wealth*, 57(SUPPL. 1). <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2011.00451.x>
- Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. 2020. Intragenerational Economic Mobility in Indonesia: A Transition from Poverty to the Middle Class in 1993-2014. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 193-224. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1657795>
- Destiana, A., & Prawoto, N. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan: Studi Kasus di 14 Kabupaten / Kota di Jawa Timur Pendahuluan Tinjauan Pustaka.

- Journal of Economics Researc Adn Social Sciences*, 2(2), 130–135.
- Elgin, C., & Birinci, S. 2016. Growth and informality: a comprehensive panel data analysis. *Journal of Applied Economics*, 19(2), 271–292. [https://doi.org/10.1016/S1514-0326\(16\)30011-3](https://doi.org/10.1016/S1514-0326(16)30011-3)
- Fan, S., Zhang, X., & Rao, N. 2004. Public Expenditure , Growth , And Poverty Reduction In Rural Uganda. *International Food Policy Research Institute*, 4, 2004.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. 2013. *Basic Econometrics*. Tata McGraw-Hill Education.
- Hantiar, M. F. 2021. Analisis Pengaruh PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan. *Journals of Economics Development Issues ( JEDI )*, 4(1), 418–431.
- Hart, K. 1973. Informal Income Urban Ghana Opportunities and. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89.
- Hohberg, M., & Lay, J. 2015. The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes : evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor & Development*, November. <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-4>.
- International Labor Office. 2018. The solar tent—cheap and effective pest control in museums. In *Women and Men in the Informal Economy: Statistical Picture (third, Vol. 28) (Vol. 28, Issue 1)*. ILO. <https://doi.org/10.1179/bac.2003.28.1.018>.
- International Labour Organization. 2010. *Informal Economy in Indonesia: Size, Composition, dan Evolution*. ILO. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_145402.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf)
- Moeis, F. R., Dartanto, T., Prananta, J., & Ikhsan, M. 2020. A longitudinal study of agriculture households in Indonesia : The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20(August), 100261. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100261>
- Momongan, J. E. 2013. Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, 1(3), 530–539.
- Mukui, G., Awiti, J., & Onjala, J. 2019. *Effect of Public Spending on Economic*

- Growth in Kenya.* 25(1), 1-11.  
<https://doi.org/10.9734/JEMT/2019/v25i130185>
- Nurhardiansyah, A., Istiyani, N., & P, F. W. 2017. Pengaruh IPM , PDRB , UMP dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2015. *Journal Ekuilibrium, II*(2), 56-61.
- Olamade, O. 2020. Is Economic Growth Working for Jobs? An Investigation of the Employment Generating Capacity of the Nigerian Economy. *Journal of Economics and Business*, 3(4).  
<https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.04.285>
- Sarte, P. G. 2000. Informality and rent-seeking bureaucracies in a model of long-run growth &. *Journal of Monetary Economics*, 46, 173-197.
- Sayfullah, & Supriatna, A. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 7 (2).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v7i2.4977>
- Taufik, M. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 no.2.
- Terminanto, A. A. 2017. Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia. *Jurnal Iqtishadia*, 10(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2012. *Economic Developement*.
- Tridiana, C., & Widyawati, D. 2019. Dampak Upah Minimum terhadap Probabilitas Keluar dari Sektor Formal. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 119-139.
- Yuen, T. 2003. The effect of minimum wages on youth employment in Canada: A panel study. *Journal of Human Resources*, 38(3), 647-672.  
<https://doi.org/10.2307/1558771>